

DAFTAR ISI

	Hal:
Lembar Judul	i
Lembar Persetujuan Promotor	ii
Lembar Persetujuan Penilai	iii
Lembar Persetujuan Penguji	iv
Lembar Pernyataan	v
Lembar Motto	vi
Ucapan Terimakasih	vii
Abstrak	xi
Abstract	xii
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xviii
Daftar Gambar	xix
Daftar Singkatan dan Akronim	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Permasalahan Penelitian	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Kajian Studi Terdahulu	10
1.5. Perspektif Teoritik	19
1.5.1. Konsep tentang Dominasi	19
1.5.2. Pemetaan Analisis Studi Gerakan Sosial	22
1.5.3. Gerakan Sosial sebagai Tindakan Kolektif yang Diorganisir	23
1.5.4. Gerakan Sosial dan Tindakan Perlawanan	26
1.5.5. Kerangka Teori Gerakan Sosial: Perspektif McAdam, McCarthy, dan Zald	28
a. Peluang atau Kesempatan Politik	

	(<i>Political Opportunity</i>)	28
	b. Struktur Penggerak (<i>Mobilizing Structure</i>)	33
	c. Pembingkaiian Kultural (<i>Cultural Framing</i>)	39
1.6.	Kerangka Berpikir (Kerangka Konseptual)	42
1.7.	Metode Penelitian	47
1.7.1.	Paradigma Penelitian	47
1.7.2.	Pendekatan Penelitian	49
1.7.3.	Jenis/Metode Penelitian	49
1.7.4.	Lokasi (<i>Setting</i>) Penelitian	51
1.7.5.	Penentuan Subjek dan Informan Penelitian	51
1.7.6.	Teknik Pengumpulan Data	52
1.7.7.	Teknik Keabsahan Data	53
1.7.8.	Teknik Analisa Data	53
1.8.	Sistematika Disertasi	56
BAB II	: GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN SIDOARJO DAN DAMPAK BENCANA LUMPUR LAPINDO	59
2.1.	Pengantar	59
2.2.	Deskripsi Umum Wilayah Kabupaten Sidoarjo	59
2.3.	Deskripsi Terjadinya Bencana Lumpur Lapindo	72
2.4.	Dampak Bencana Lumpur Lapindo dan Perubahan Pada Wilayah Peta Area Terdampak (PAT)	82
2.5.	Pembagian Wilayah Peta Area Terdampak Bencana Lumpur Lapindo: Dalam PAT dan Luar PAT	96
2.6.	Bencana Lumpur Lapindo sebagai Arena Produksi Ketidakadilan	98

	2.7.	Simpulan	113
BAB III	:	DOMINASI NEGARA DAN KORPORASI DALAM BENCANA LUMPUR LAPINDO	115
	3.1.	Pengantar	115
	3.2.	Kebijakan Eskplorasi Migas di Wilayah di Wilayah Kecamatan Porong, Sidoarjo	115
	3.3.	Konstelasi Politik pada Latar Kebijakan Pemerintah terkait Bencana Lumpur Lapindo	119
	3.4.	Kebijakan Eksplorasi Migas di Wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo sebagai Pelanggaran atas Penerapan RTRW Wilayah Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo	120
	3.5.	Ketidakterbukaan dalam Proses Pembelian Tanah Warga Masyarakat	126
	3.6.	Indikasi Pelanggaran HAM dalam Eksplorasi Migas	128
	3.7.	Dampak Bencana Lumpur Lapindo Terhadap Munculnya Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Bagi Korban Bencana	131
	3.8.	Pembagian Tanggungjawab Wilayah Peta Area Terdampak Bencana Lumpur Lapindo	136
	3.9.	Kebijakan Pemerintah yang Tidak Pro-Korban Bencana	138
	3.10.	Simpulan	139
BAB IV	:	PEMETAAN DAN DINAMIKA GERAKAN SOSIAL KORBAN BENCANA LUMPUR LAPINDO	142
	4.1.	Pengantar	142
	4.2.	Pemetaan Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo	143

4.3.	Dinamika Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo	143
4.4.	Simpulan	153
BAB V	: KEBIJAKAN DOMINATIF NEGARA DAN KORPORASI YANG MELAHIRKAN IDE GERAKAN SOSIAL KORBAN BENCANA LUMPUR LAPINDO	155
5.1.	Pengantar	155
5.2.	Kegagalan Pihak Pemerintah dan PT LBI dalam Menghentikan Semburan Lumpur	155
5.3.	Mobilisasi Massa yang Berbasis Komunitas Masyarakat Lokal	158
5.4.	Dukungan dan Peran Advokasi Koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	162
5.5.	Aksi Tuntutan Korban Bencana Lumpur Lapindo	176
5.6.	Kesadaran Identitas Kolektif Sebagai “Korban Bencana Lumpur Lapindo” Belum Terbentuk	179
5.7.	Simpulan	181
BAB VI	: PROSES PEMANTAPAN DAN KONSOLIDASI MENUJU AKSI GERAKAN SOSIAL KORBAN BENCANA LUMPUR LAPINDO	183
6.1.	Pengantar	183
6.2.	Situasi dan Kondisi yang Mendasari Munculnya Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo	184
6.3.	Terbentuknya Kelompok (Organisasi) Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo	189
6.4.	Aksi Tuntutan Kolektif Korban Bencana Lumpur Lapindo	211

6.5.	Pembentukan Identitas Kolektif Sebagai "Korban Bencana Lumpur Lapindo"	215
6.7.	Simpulan	223
BAB VII :	PROSES PENURUNAN (<i>DECLINING</i>): GERAKAN SOSIAL SEBAGAI ALAT KEPENTINGAN PEMIMPIN	225
7.1.	Pengantar	225
7.2.	Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) dan Penurunan Peluang Gerakan Sosial	225
7.3.	Re-Organisasi Kelompok Gerakan Sosial Korban Bencana Lumpur Lapindo	229
7.4.	Munculnya Relasi Pertukaran Sosial Antara Aktor Pemimpin Kelompok Gerakan Sosial dengan Pihak Korporasi	240
7.5.	Bias Identitas Kolektif Antara "Korban Bencana Lumpur Lapindo" vs "Korban Bencana Lumpur Sidoarjo"	245
7.6.	Simpulan	254
BAB VIII :	PENUTUP: KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TOERITIK	256
8.1.	Kesimpulan	256
8.2.	Implikasi Teoritik	259
8.3.	Agenda Studi Lanjutan	262
Daftar Pustaka		265
Lampiran		281